

ABSTRAK

MUHAMMAD ALFI, NPM (2022251) “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN (STUDI RETRIBUSI ANGKUTAN BATU BARA DI UPTD PERHUBUNGAN DERMAGA MENGGATIP) di bawah bimbingan Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. sebagai pembimbing I, Bapak Dr. Jumaidi, S.Sos., M.AP. sebagai pembimbing II.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perhubungan merupakan pilar utama kemandirian fiskal Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024, aktivitas angkutan batu bara di Sungai Barito memiliki potensi retribusi yang besar, namun implementasinya pada UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip masih menghadapi berbagai hambatan operasional. Kendala tersebut meliputi sistem pelaporan hasil pungutan retribusi angkutan batu bara kapal tongkang yang masih bersifat manual, fluktuasi setoran yang belum mencapai target, serta ketiadaan pasokan listrik yang menghambat efisiensi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan retribusi angkutan batu bara kapal tongkang serta mengidentifikasi berbagai faktor pendorong dan penghambatnya

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 8 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi angkutan batu bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip belum sepenuhnya optimal. Implementasi yang sudah optimal dilihat dari aspek yang melingkupi komunikasi, disposisi atau sikap petugas di lapangan, dan struktur birokrasi melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP). Adapun aspek yang belum optimal yaitu pada dimensi sumber daya. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan berupa keterbatasan anggaran operasional, belum tersedianya perangkat komputer dinas sehingga harus mengandalkan peralatan milik pribadi, kondisi armada transportasi sungai yang sudah kurang prima, ketiadaan pasokan listrik yang memadai di lokasi pemungutan, serta tantangan alam berupa cuaca ekstrem dan fluktuasi debit air sungai. Adapun faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu adanya landasan hukum yang tegas serta tingkat kepatuhan atau sikap kooperatif dari para subjek retribusi.

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan retribusi angkutan batu bara pada UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, maka disarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD agar melakukan pengadaan perangkat komputer kantor, pemeliharaan armada sungai, dan penyediaan akses listrik. Disamping itu, perlu alokasi anggaran operasional yang memadai serta pengawasan berkala guna menjamin tercapainya target anggaran secara maksimal. meminimalisir fluktuasi setoran sehingga target anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.